

dan masyarakat juga pemerintah dalam hal ini adalah dinas pendidikan.<sup>9</sup>

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **B. Konsep Manajemen Pembiayaan**

##### **1. Definisi Manajemen Pembiayaan**

Pengertian manajemen berasal dari kata *To Manage* yang artinya mengatur, yang diatur adalah semua unsur-unsur manajemen yang terdiri dari Man, mone, methods, material, macines, dan market. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi, manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Dini Arfian, *Manajemen Anggaran Pembiayaan di SMP NU 07 Brangsong Kendal*, (Skripsi UIN Walisongo Semarang: tidak diterbitkan, 2015), hal.vii.

<sup>10</sup> Malayu Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 1.

Manajemen Pembiayaan adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya yang dilakukan oleh suatu badan yang menjalankan kegiatan usahanya. Manajemen yang mengkaitkan pemerolehan (acquitition), pembiayaan / pembelanjaan (financing) dan manajemen aktiva dengan tujuan secara menyeluruh dari suatu perusahaan. Semua kegiatan / aktivitas perusahaan yang bersangkutan dengan usaha mendapatkan dana yang dibutuhkan oleh perusahaan beserta usaha untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin.

Hal yang wajib yang harus dilakukan oleh seorang manajer keuangan adalah mengelola segala unsur dan segi keuangan dalam suatu perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Oleh kerana itu manajer keuangan harus mengetahui berbagai aktivitas manajemen keuangan, khususnya penganalisan sumber dana dan penggunaannya untuk merealisasikan keuntungan maksimum bagi perusahaan.<sup>11</sup>

Stoner dan Freeman, manajemen adalah suatu proses perencanaan, mengorganisasikan, memimpin dan mengawasi pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi yang

---

<sup>11</sup>Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah* (Bandung: Rosda Karya, 2002), 48.

dinyatakan dengan jelas.<sup>12</sup> Terry memberikan definisi : Management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling, performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human beings and other resources. Manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan dengan menggunakan sumber manusia dan sumber lain.<sup>13</sup>

## 2. Implementasi Manajemen

### a. Perencanaan

Perencanaan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu secara efisien dan efektif.<sup>14</sup> Perencanaan adalah kegiatan yang akan dilakukan dimasa yang akan datang untuk mencapai tujuan dengan kegiatan yang ditetapkan sebelumnya, adanya proses, hasil yang ingin dicapai, dan menyangkut masa depan dalam waktu tertentu.<sup>15</sup> Perencanaan

---

<sup>12</sup> Muhammad Rohman dan Sofan Amri, *Manajemen Pendidikan (Analisis dan Solusi Terhadap Kinerja Manajemen Kelas dan Strategi Pengajaran yang Efektif)*, Jakarta, PT. Prestasi Pustakaraya, 2012, h.2

<sup>13</sup> Terry G.R., *Principles of Management*, Homewood, Richard D Irwin, INC, 1977, h. 4

<sup>14</sup> Fattah, Nanang, *Landasan Manajemen Pendidikan*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2013), 49.

<sup>15</sup> Usman, Husaini, *Manajemen, Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2013), 77

merupakan tindakan menetapkan sesuatu yang akan dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, apa yang harus dikerjakan dan siapa yang mengerjakannya. Perencanaan merupakan jembatan yang menghubungkan kesenjangan antara keadaan masa kini dan mendatang. Jadi perencanaan dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan adalah keputusan yang diambil untuk melakukan tindakan selama waktu tertentu agar penyelenggaraan pengelolaan pembiayaan pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien. Agar semua kebutuhan madrasah / sekolah dapat terpenuhi sehingga kelak menghasilkan lulusan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan pembangunan. Hal terpenting dalam menyusun rencana anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS) adalah memanfaatkan dan mengalokasikan dana secara tepat menurut kebutuhan yang diperlukan madrasah. Ada empat langkah dasar perencanaan pembiayaan pendidikan, yaitu :

Pertama menetapkan tujuan, artinya perencanaan dimulai dengan keputusan untuk menetapkan sebuah tujuan, tanpa tujuan yang jelas sebuah madrasah akan menggunakan daya secara tidak efektif.

Kedua merumuskan keadaan saat ini, pemahaman kondisi sekarang dari tujuan yang hendak dicapai sangat penting, karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang.

Ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan, kekuatan, kelemahan serta hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan dalam mencapai tujuan.

Keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan tahap akhir dalam proses perencanaan yang meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan.<sup>16</sup>

b. Pengorganisasian / Organizing

Pengorganisasian sebagai proses membagi kerja kedalam tugas-tugas yang lebih kecil, membedakan tugas-tugas itu kepada orang yang sesuai dengan kemampuannya, dan mengalokasikan sumber daya, serta mengkoordinasikannya dalam kerangka efektifitas pencapaian tujuan organisasi.<sup>17</sup> Proses pengorganisasian dalam menyusun RAPBM/S diawali dengan pemerincian pekerjaan, pembagian kerja, penyatuan pekerjaan, koordinasi pekerjaan, dan monitoring.

c. Pengaktualisasian/pelaksanaan/aktuanting

Pada proses ini perencanaan pendidikan tinggal mengatur bagaimana menjalankan/menggerakkan perencanaan pembiayaan pendidikan yang telah diperinci kedalam pengorganisasian anggaran pendidikan, dengan berpedoman bahwa penggunaan

---

<sup>16</sup> Luneto Buhari, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di Madrasah, Tadbir*, Vol.3, No 2, 2015, IAIN Sultan amai Gorontalo, 23-24

<sup>17</sup> Fattah, Nanang, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, 71.

anggaran pendidikan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam RAPBM/S. Dalam hal ini pelaksana adalah bendahara madrasah yang harus mencatat keluar masuknya pergerakan pembiayaan pendidikan.

d. Pengawasan/kontroling

Pengawasan adalah aktivitas menilai, baik catatan (record) dan menentukan prosedur-prosedur dalam mengimplementasikan anggaran, apakah sesuai dengan peraturan, kebijakan, dan standar-standar yang berlaku.<sup>18</sup> Tujuan dari pengawasan adalah mengukur, membandingkan, menilai alokasi biaya dan tingkat penggunaannya, artinya pengawasan pembiayaan pendidikan diharapkan dapat mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi dari penggunaan sumber-sumber dana yang tersedia dan membantu mempertahankan hasil atau output yang sesuai dengan syarat-syarat sistem. Proses pengawasan terdiri dari tiga kegiatan pokok, yaitu : memantau (monitoring), menilai, dan melaporkan hasil-hasil temuan kegiatan atau monitoring dilakukan terhadap kinerja aktual baik dalam proses maupun hasilnya, aktifitas yang sedang dan telah dilakukan terhadap kinerja aktual baik dalam proses maupun hasilnya berdasarkan kriteria yang digariskan. Dalam proses pengawasan terhadap beberapa unsur yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu :

---

<sup>18</sup> Ibid,65.

- 1) Unsur proses, yaitu usaha yang bersifat kontinu terhadap suatu tindakan yang dimiliki dari pelaksanaan suatu rencana sampai dengan hasil akhir yang diharapkan.
- 2) Unsur adanya objek pengawasan, yaitu sesuatu yang menjadi sasaran pengawasan, baik permainan atau pengeluaran.
- 3) Ukuran dan standarisasi dari pengawasan
- 4) Teknik-teknik pengawasan.

Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses pengawasan pembiayaan pendidikan adalah

- 1) Penetapan standar yang dipergunakan berupa kuantitas, kualitas, biaya dan waktu.
- 2) Mengukur dan membandingkan antara kenyataan dan sebenarnya dengan standar yang telah ditetapkan.
- 3) Mengidentifikasi penyimpangan (deviasi)
- 4) Menentukan tindakan perbaikan atau koreksi yang kemudian menjadi materi rekomendasi.<sup>19</sup>

### 3. Konsep Accounting yang Erat dengan Keuangan

Accounting” (Akuntansi) yang artinya bila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia adalah menghitung atau mempertanggung jawabkan Akuntansi sangat erat kaitannya dengan informasi keuangan. Akuntansi adalah suatu proses yang mengidentifikasi data

---

<sup>19</sup> Ibid, 67

keuangan, pencatatan, dan sebagai hasil akhirnya laporan keuangan.<sup>20</sup>

Definisi akuntansi dapat dirumuskan dari dua sudut pandang yaitu definisi dari sudut pandang pemakai jasa akuntansi dan proses kegiatannya.

Definisi dari sudut pandang pemakai - akuntansi dapat didefinisikan sebagai “suatu disiplin ilmu yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan. pada searah efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi”. Informasi yang dihasilkan akuntansi diperlukan untuk : Membuat Perencanaan yang efektif, pengawasan, dan pengambilan keputusan oleh manajemen, Pertanggung jawaban organisasi kepada para investor, kreditor, dan badan pemerintah.

Definisi dari sudut pandang proses kegiatan - ditinjau dari sudut kegiatannya, akuntansi dapat didefinisikan sebagai “Proses Pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisisan data keuangan suatu organisasi”. Kegiatan akuntansi merupakan tugas yang kompleks dan menyangkut berbagai kegiatan pada dasarnya, akuntansi harus : Mengidentifikasi data mana yang berkaitan atau relevan dengan keputusan yang akan diambil, Memproses atau menganalisis data yang relevan, Mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Eldon. S . Hendriksen, *Teori Akuntansi* (Jakarta : Erlangga, ), 1.

<sup>21</sup> Ibid., 53-54.

Akuntansi manajemen adalah aktivitas mengumpulkan, menganalisa, menyajikan dalam bentuk angka, mengklasifikasikan, mencatat, meringkas, dan melaporkan aktivitas / transaksi perusahaan dalam bentuk informasi keuangan.

Dilihat dari siapa pemakai laporan keuangan perusahaan. Akuntansi dibagi menjadi dua macam, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen.

- 1) Akuntansi keuangan adalah sistem akuntansi yang memakai informasi adalah pihak eksternal organisasi perusahaan, seperti kreditor, pemerintah, pemegang saham, investor dan sebagainya.
- 2) Akuntansi manajemen adalah sistem akuntansi yang memakai informasinya adalah pihak internal organisasi perusahaan, seperti manajer produksi, manajer keuangan, manajer perusahaan.

Dalam bidang pelaporannya, akuntansi keuangan hanya menyajikan laporan secara garis besar dengan memperhatikan seluruh bagian perusahaan secara umum, sedangkan akuntansi manajemen menghasilkan pelaporan yang lebih terperinci, dengan memperhatikan detail dari setiap divisi, tiap-tiap produk, tiap-tiap departemen.<sup>22</sup>

Peran dan fungsi akuntansi dalam dunia penelitian adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, agar berguna dalam entitas pendidikan.

---

<sup>22</sup> Rudianto, *Akuntansi manajemen* ( Jakarta : Grasindo. 2006), 9.

Peran akuntansi dalam pendidikan :

a. Kepala sekolah

Menyusun perencanaan sekolah yang dipimpinnya, mengevaluasi, kemajuan yang dicapai dalam usaha mencapai tujuan, melakukan tindakan-tindakan koreksi yang diperlukan, keputusan yang diambil kepala sekolah berdasarkan informasi akuntansi adalah menentukan peralatan apa yang sebaiknya dibeli, perlengkapan dan lain-lain.

b. Guru dan karyawan

Memberikan informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas di institusi pendidikan informasi penilaian kemampuan sekolah dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja.

c. Reditior / pemberi pinjaman

Memberi informasi keuangan yang memungkinkan untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo.

d. Orang tua siswa

Peran orang tua siswa berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup institusi pendidikan.

e. Pemerintahan

Pemerintah berkepentingan terhadap alokasi sumber daya, berkepentingan dengan aktivitas sekolah, dibutuhkan untuk mengatur aktivitas sekolah, menetapkan kebijakan anggaran untuk tahun-tahun berikutnya.

Fungsi Akuntansi dalam Pendidikan

- 1) Menemukan peralatan apa yang sebaiknya dibeli, dan berapa persediaan akuntansi yang harus ada dibagian perlengkapan.
- 2) Memberi informasi penilaian kemampuan pendidikan dalam memberikan balas jasa manfaat pensiun dan kesempatan kerja.
- 3) Memberi informasi dasar yang dibutuhkan untuk mengatur aktivitas pendidikan
- 4) Menyediakan informasi tentang kecenderungan dan perkembangan pengelolaan keuangan institusi pendidikan serta rangkaian aktivitas.<sup>23</sup>

### C. Pembiayaan Pendidikan

1. Istilah Pembiayaan Pendidikan

Pengertian biaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan) sesuatu, ongkos belanja, dan pengeluaran.<sup>24</sup> Sedangkan

---

<sup>23</sup> Indra Bastian, *Akuntansi pendidikan* (Yogyakarta: Erlangga, 2006), 56-59.

<sup>24</sup> Pusat Bahasa Departemen pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi Keempat) (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 186.

definisi pembiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya.<sup>25</sup>

Biaya merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Penentuan biaya akan memengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan didalam satu organisasi. Jika suatu kegiatan dilaksanakan dengan biaya yang relative rendah, tetapi menghasilkan produk yang berkualitas tinggi, maka hal ini dapat dikatakan, bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan secara efisien dan efektif.<sup>26</sup>

Dalam konsep pembiayaan pendidikan setidaknya ada tiga pernyataan yang terkait didalamnya. Seperti dikemukakan oleh Thomas John (1985:20) yaitu bagaimana uang diperoleh untuk membiayai lembaga pendidikan, dari mana sumbernya, dana untuk apa dibelanjakan serta siapa yang membelanjakan. Hal itu merupakan administrasi atau manajemen bisnis lembaga pendidikan.

Pembiayaan pendidikan, merupakan aktivitas yang berkenaan dengan perolehan dana (pendapatan) yang diterima dan bagaimana penggunaan dana tersebut dipergunakan untuk membiayai seluruh program pendidikan yang telah ditetapkan. Pendapatan atau sumber dana pendidikan yang diterima sekolah diperoleh dari APBN, APBD, dan masyarakat atau orang tua.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Ibid., 187

<sup>26</sup>Matin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), 1.

<sup>27</sup>Akdon,et.al, *Manajemen Pembiayaan pendidikan* (Bandung: Rosdakarya,2015), 23.

Adapun bagaimana penggunaan data tersebut, menurut John, Morphet, dan Alexanders (1983), setiap sekolah seharusnya menetapkan rencana-rencana yang menjadi prioritas pembiayaan pendidikan secara komprehensif. Perencanaan yang komprehensif dari sebuah program pembiayaan sekolah melibatkan pembuatan keputusan yang kritis dalam wilayah-wilayah utama berikut ini.

1. Program pendidikan yang harus dibiayai
2. System pajak yang digunakan untuk pembiayaan program tersebut.
3. System alokasi dana Negara untuk wilayah atau daerah persekolahan.

Selain dari itu, perencanaan program pendidikan juga melibatkan keputusan kebijakan yang fundamental berkaitan dengan hal-hal berikut ini.

1. Siapa yang seharusnya dididik? Sasarana populasi apa yang seharusnya dilayani ?
2. Tujuan-tujuan pendidikan apa yang seharusnya dibuat untuk setiap sasaran populasi?
3. Jenis program pendidikan apa yang dibutuhkan untuk sasaran populasi yang berbeda ini ?<sup>28</sup>

Pembiayaan merupakan hal penting dalam keberhasilan penyelenggaraan pendidikan, dan pemerintah memiliki peran yang

---

<sup>28</sup> Ibid.,24

besar di dalamnya. Agar penggunaan dana efektif setiap lembaga pendidikan, sekolah seharusnya menetapkan rencana yang menjadi prioritas pembiayaan pendidikan secara komprehensif dari program pembiayaan yang melibatkan keputusan yang kritis dalam wilayah program pendidikan yang harus dibiayai, system pajak yang digunakan untuk pembiayaan program, dan system alokasi dana Negara untuk wilayah atau daerah persekolahan. Fungsi pembiayaan adalah untuk mendukung agar penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan landasan dan misi yang diemban bangsa.<sup>29</sup>

Proses penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan perlu didukung biaya yang memadai sehingga menjamin kelancaran berbagai kegiatan yang diselenggarakan. Pembiayaan pendidikan pada dasarnya adalah menitikberatkan pada upaya pendistribusian benefit pendidikan dan beban yang harus ditanggung oleh masyarakat. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya operasional, dan biaya personal.

a) Biaya Operasional

Biaya operasional dalam standar pembiayaan pendidikan terdiri dari :

- 1) Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji

---

<sup>29</sup>Akdon, et.al, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosda karya, 2015), 23.

- 2) Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai
  - 3) Biaya operasional pendidikan tak langsung berupa, daya, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana prasarana, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan sebagainya.<sup>30</sup>
- b) Biaya Personal

Biaya personal merupakan biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan, antara lain meliputi pakaian, transpor, buku, konsumsi, dan akomodasi. Di dalam Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pembiayaan pendidikan terdiri dari biaya investasi, biaya operasional dan biaya personal.

Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap. PP ini diperkuat dengan PP No 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, di mana biaya pendidikan meliputi biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan atau pengelolaan pendidikan, dan biaya pribadi peserta didik. Biaya satuan pendidikan terdiri dari biaya investasi, biaya operasi, bantuan biaya pendidikan, dan beasiswa. Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan terdiri dari biaya investasi dan biaya operasional. PP No 48 tahun 2008 ini

---

<sup>30</sup> Fatah Nanang, *Standar Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 93.

sifatnya melengkapi dan mengukuhkan PP No 19 tahun 2005, tidak ada pemberlakuan standar ganda pada penggunaan kedua PP tersebut, karena PP No 48 tahun 2008 memberikan penafsiran yang lebih jelas terhadap PP no 19 tahun 2005 tentang pendanaan pendidikan.

## 2. Sistem Pembiayaan Pendidikan

Biaya pendidikan adalah nilai rupiah yang digunakan untuk kegiatan pendidikan yang terdiri dari seluruh sumber daya.<sup>31</sup> Biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa yang berupa pembelian alat –alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan pemerintah, orangtua , maupun siswa sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang yang dikorbankan siswa selama belajar.<sup>32</sup>

Pembiayaan pendidikan merupakan aktifitas yang berkenaan dengan perolehan dana (pendapatan) yang diterima dan bagaimana penggunaan dana tersebut digunakan untuk membiayai seluruh program pendidikan yang telah ditetapkan.<sup>33</sup> Sistem pembiayaan

---

<sup>31</sup> Ibid, 96.

<sup>32</sup> Fatah, Nanang, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, 23.

<sup>33</sup> Akdon, *et.al*, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 23.

pendidikan merupakan proses dimana pendapatan dan sumber dana tersedia digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasionalkan sekolah. Pendapatan atau sumber dana pendidikan diperoleh dari APBN, APBD, dan masyarakat atau orang tua. Jadi pembiayaan pendidikan adalah aktifitas mengelola pendanaan pendidikan yang berwujud uang dan barang untuk membiayai program kegiatan pendidikan yang telah ditetapkan. Setiap kebijakan dalam pembiayaan sekolah akan mempengaruhi bagaimana sumber daya diperoleh dan dialokasikan dan digunakan sebesar besarnya untuk mencerdaskan peserta didik dan peningkatan mutu.

Pembiayaan merupakan hal penting dalam keberhasilan penyelenggaraan pendidikan, dan pemerintah memiliki peran yang besar di dalamnya. Agar penggunaan dana efektif setiap lembaga pendidikan, sekolah seharusnya menetapkan rencana yang menjadi prioritas pembiayaan pendidikan secara komprehensif dari program pembiayaan yang melibatkan keputusan yang kritis dalam wilayah program pendidikan yang harus dibiayai, sistem pajak yang digunakan untuk pembiayaan program, dan sistem alokasi dana negara untuk wilayah atau daerah persekolahan. Fungsi pembiayaan adalah untuk mendukung agar penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan landasan dan misi yang diemban bangsa.

Konsep pembiayaan identik dengan anggaran. Anggaran merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif

pada bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan lembaga pada kurun waktu tertentu. Anggaran pembiayaan pendidikan disusun untuk menggambarkan seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan. Anggaran dapat berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian pada manajemen pembiayaan pendidikan untuk mengarahkan sekolah dalam melaksanakan kegiatan pendidikan.

Pendidikan dalam operasionalnya tidak terlepas dari pembiayaan atau moneter. Biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan tidak akan tampak hasilnya secara nyata dalam waktu yang relatif singkat, oleh karena itu uang yang dikeluarkan pemerintah, masyarakat, maupun orangtua, untuk menghasilkan pendidikan atau membeli pendidikan bagi anaknya dipandang sebagai investasi, yang dimasa mendatang akan menghasilkan keuntungan atau manfaat dalam bentuk finansial dan non finansial.<sup>34</sup> Dukungan finansial yang cukup akan mempermudah memanagerial suatu lembaga pendidikan untuk berbuat banyak dalam upaya memajukan lembaga pendidikan yang dipimpin. Keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan pendidikan. Kedua hal tersebut merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan-

---

<sup>34</sup> Ibid., 25-26.

kegiatan proses belajar mengajar di sekolah bersama komponen-komponen lainnya.

Pembiayaan pendidikan sangat terkait dengan kepercayaan masyarakat untuk turut andil dan merasa memiliki lembaga tersebut, oleh karenanya jika lembaga ingin mendapatkan dana dari partisipasi masyarakat maka lembaga harus memiliki program yang bagus. Kepercayaan memang dapat membangunkan kesadaran seseorang untuk memberikan bantuan dana. Dengan demikian kepercayaan masyarakat, terutama para agniya calon donatur, harus diperkuat dan dijaga. Untuk membangun dan memperkuat kepercayaan mereka. Ada beberapa langkah yang perlu ditempuh, yaitu :

1. Pihak yang mengajukan proposal kepada calon donatur haruslah orang yang jujur, bersih dan amanat.
2. Lembaga pendidikan harus mampu menunjukkan bahwa bantuan dari pihak lain yang diterima telah dimanfaatkan secara benar dan dapat dibuktikan.
3. Pihak yang mengajukan bantuan bersama kelompoknya haruslah orang-orang yang dikenal memiliki semangat besar untuk menghidupkan dan memajukan lembaga.
4. Calon donatur harus bisa diyakinkan bahwa pelaksanaan program benar-benar sangat penting, bahkan mendesak untuk segera diwujudkan

5. Calon donatur perlu disadarkan bahwa bantuan yang akan diberikan untuk pembangunan lembaga pendidikan merupakan shadaqah jariyah yang pahalanya terus mengalir.<sup>35</sup>

Pembiayaan pendidikan di madrasah /sekolah dapat diketahui dari anggaran penerimaan dan pengeluaran. Anggaran penerimaan adalah pendapatan yang diperoleh setiap tahun dari berbagai sumber dan diterima secara teratur. Anggaran penerimaan berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, orang tua siswa, dan sumbangan masyarakat. Anggaran pengeluaran pendidikan merupakan jumlah uang yang dibelanjakan setiap tahun . Belanja sekolah ditentukan oleh unsur-unsur yang jumlah dan perbandingannya bervariasi baik ditinjau dari jenis dan jenjang sekolah, daerah, maupun waktu. Unsur-unsur pengeluaran sekolah/madrasah secara umum meliputi , pelaksanaan pembelajaran, tata usaha, pemeliharaan sarana dan prasarana, kesejahteraan pegawai, administrasi, pembinaan teknis edukatif, dan pendataan.<sup>36</sup>

Menentukan biaya pendidikan di Madrasah/sekolah perlu dianalisis biaya total (*total cost*) dan biaya satuan siswa (*unit cost*). Biaya total , disebut juga biaya satuan sekolah yang merupakan kumpulan biaya yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan orangtua siswa yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan pendidikan

---

<sup>35</sup> Qomar Mujamil, *Manajemen Pendidikan Islam* (Jakarta: Airlangga, 2007), 156.

<sup>36</sup> Fattah, Nanang, *Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan*, 24.

selama satu tahun pelajaran. Biaya satuan siswa merupakan ukuran yang menggambarkan besaran uang yang dialokasikan madrasah/sekolah untuk kepentingan siswa dalam menempuh pendidikan. Dengan menganalisis biaya satuan ini dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya di setiap madrasah/sekolah, manfaat dari investasi pendidikan, dan pengeluaran keluarga, masyarakat, pemerintah, dalam penyelenggaraan pendidikan.

Sifat biaya pendidikan sangat kompleks karena komponen biaya itu berbeda antara jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Demikian pula biaya pendidikan bukan hanya berbentuk uang, tetapi juga dalam bentuk biaya kesempatan, dan sumber daya lain yang digunakan untuk menunjang pendidikan. Biaya kesempatan tersebut sering disebut *income forgone*, yakni potensi pendapatan bagi seorang siswa selama mengikuti pelajaran atau menyelesaikan pendidikan. Demikian pula biaya kesempatan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan akan berbeda jumlahnya. Itulah sebabnya, karena biaya pendidikan terdiri atas biaya langsung dan biaya tak langsung, maka perhitungan biaya pendidikan dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :  $C = L + K$  Dengan :

C = biaya

L = biaya langsung yang dibayarkan untuk bersekolah di jenjang pendidikan tertentu.

K = Jumlah rata-rata penghasilan tamatan pendidikan di bawahnya.<sup>37</sup>

Penghitungan biaya pendidikan mengklasifikasi biaya pendidikan menjadi biaya satuan pendidikan tingkat orangtua siswa, tingkat sekolah, dan tingkat daerah. Biaya satuan pendidikan di tingkat orangtua meliputi, biaya buku dan alat tulis sekolah, biaya pakaian dan perlengkapan sekolah, biaya akomodasi, biaya transportasi, biaya konsumsi, biaya kesehatan, biaya karyawisata, uang saku, kursus, iuran sekolah, biaya satuan pendidikan tingkat orangtua siswa, tingkat sekolah, dan tingkat daerah. Biaya satuan pendidikan tingkat orang tua siswa meliputi : biaya buku dan alat tulis sekolah, biaya pakaian dan perlengkapan sekolah, biaya akomodasi, biaya transportasi, biaya konsumsi, biaya kesehatan, biaya karyawisata, uang saku, biaya kursus. Iuran madrasah, dan biaya kesempatan. Biaya satuan pendidikan ini dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh biaya pendidikan untuk keperluan satu siswa dalam satu tahun.<sup>38</sup>

### 3. Peran serta Masyarakat Dalam Keuangan Sekolah

Partisipasi masyarakat seakan menjadi kata kunci untuk memecahkan masalah di sekolah. Pemerintah di negara manapun, dengan dalih mengembalikan lembaga sekolah kepada pemilik

---

<sup>37</sup> Ibid, .24.

<sup>38</sup> Ibid, 25.

utamanya yaitu masyarakat, menggembar-gemborkan ide ini. Tapi sebenarnya ada sebuah misi utama dibalik propaganda ini, yaitu meringankan beban keuangan pemerintah dengan mengajak masyarakat untuk menyediakan dana lebih dalam pengembangan sekolah.

Partisipasi masyarakat yang khas, yang bercirikan karakternya orang Indonesia. Di samping itu Administrasi anggaran/biaya sekolah merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan/ diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap biaya oprasional sekolah, sehingga kegiatan oprasional pendidikan semakin efektif dan efisien, demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Secara garis besar kegiatannya meliputi pengumpulan/penerimaan dana yang sah (dana rutin, spp, sumbangan BP3, Donasi dan usaha-usaha halal lainnya), penggunaan dana, dan pertanggung jawaban dana kepada pihak-pihak terkait yang berwenang.

Dana yang masuk itu di sebut dana masukan (input) yang kemudian setelah dilakukan perencanaan anggaran (budgeting), lalu digunakan dalam pelaksanaan oprasional pendidikan (throughput), dan akhirnya dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan yang berlaku bersama hasil usaha (output) yang dihasilkan.

Dasar Peran Serta Masyarakat Dalam Pembiayaan Sekolah Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara orang tua,

masyarakat dan pemerintah. Dengan dasar pada kata-kata bijak itu, maka perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia menjadi beban bersama orang tua, masyarakat dan pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan beberapa peran yang dapat dilakukan oleh masyarakat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan, diantaranya adalah: Hak dan Kewajiban Masyarakat. Pada pasal 8 dan 9 UUSPN disebutkan bahwa masyarakat berhak untuk berperanserta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasaan, dan evaluasi program pendidikan. Sedangkan pasal 9 menyebutkan bahwa masyarakat wajib memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.<sup>39</sup>

#### **D. Standar Pembiayaan Pendidikan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang terdapat beberapa Standar Nasional Pendidikan, Bab XI Pasal 62 tentang Standar Pembiayaan yang harus dipenuhi oleh madrasah dalam dalam pengelolaan pembiayaan madrasah yakni<sup>40</sup>;

- 1) Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.

---

<sup>39</sup> Budi Purnama, “Partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan disekolah” <https://bud1purn4m4.wordpress.com/2012/10/31//>, diakses tanggal 19 Pebruari 2018

<sup>40</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005

- 2) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.
- 3) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- 4) Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a) Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.
  - b) Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai.
  - c) Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa, dan telekomunikasi.
  - d) Pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.
- 5) Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.